

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perpustakaan merupakan suatu instansi yang memiliki tugas sebagai pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan Pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka (UU Republik Indonesia No.43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan, 2007). Dalam pasal 4 UU Republik Indonesia No.43 Tahun 2007 Tentang perpustakaan (2007), mengatakan bahwa suatu perpustakaan berfungsi sebagai pemberi layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam Undang-undang yang sama, pada pasal 5 tercantum bahwa seluruh masyarakat memiliki hak yang sama untuk memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan, termasuk masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan secara fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial dengan catatan layanan yang diperoleh disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing. Kedua pasal tersebut menunjukkan bahwa pelayanan suatu perpustakaan ditujukan kepada seluruh lapisan masyarakat tak terkecuali individu yang berkebutuhan khusus. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa setiap manusia memiliki hak yang setara dalam rangka memenuhi kebutuhan akan informasi melalui perpustakaan.

Dalam Undang-Undang No. 08 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (2016), Pada pasal 5 undang-undang ini menyatakan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak-hak yang sama dengan non penyandang disabilitas yaitu hak untuk hidup, bebas dari stigma, privasi, Pendidikan, kesejahteraan, sosial, aksesibilitas, dan pelayanan publik sedangkan pada pasal 18 berisi hak aksesibilitas untuk Penyandang disabilitas dalam memanfaatkan fasilitas publik. Seluruh bangunan publik diharapkan memiliki aksesibilitas yang memadai sehingga pengguna disabilitas dimudahkan dalam mengakses bangunan tanpa perlu bantuan khusus sehingga tercipta suatu kesetaraan. Perpustakaan Umum sebagai salah satu fasilitas publik yang memiliki peran penting dalam pelayanan perpustakaan kepada masyarakat sudah seharusnya dapat diakses oleh seluruh lapisan penduduk tanpa terkecuali.

Undang-Undang tersebut menjadi dasar bahwa suatu perpustakaan khususnya perpustakaan umum seharusnya dapat melayani seluruh lapisan masyarakat tidak terkecuali individu berkebutuhan khusus. Pemerintah juga berkewajiban dalam menjamin ketersediaan koleksi perpustakaan melalui terjemahan (translasi), alih aksara (transliterasi), alih suara (transkripsi), dan alih media (transmedia) (UU Republik Indonesia No.43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan, 2007). Hal-hal tersebut merupakan upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kesetaraan dalam bahan pustaka, sehingga individu dengan kebutuhan khusus seperti tuna netra, tuna rungu dapat mendapatkan layanan yang sama. Hal tersebut juga merupakan bentuk layanan perpustakaan dengan memberikan suatu fasilitas bagi masyarakat tanpa memandang perbedaan latar belakang, agama, ras, budaya, dan fisik. Pemerintah juga mengeluarkan UU No.25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik (2009), dimana UU tersebut

merupakan penjabaran pelayanan publik bagi seluruh warga negara tidak terkecuali penduduk berkebutuhan khusus.

Pada kenyataannya, hak-hak tersebut masih belum dapat terpenuhi, salah satunya dalam aksesibilitas dan pelayanan publik. Di kota Semarang sendiri masih banyak bangunan pemerintahan yang belum dilengkapi dengan fasilitas bagi penyandang disabilitas (jatengprov.go.id, 2018). Sebagai gambaran, di kota Semarang perpustakaan umum kota yang menempati bangunan Pemerintah belum dapat memenuhi kebutuhan daripada individu berkebutuhan khusus, dari segi arsitektural hingga bahan pustaka.

Pada perpustakaan umum kota Semarang hambatan terlihat pada belum tersedianya bahan pustaka bagi difabel seperti buku braille, buku cetak besar, *audiobook* dan sebagainya. Selain itu dari segi arsitektural, Lorong antar rak buku terbilang sempit dengan lebar hanya sebesar 60 cm, akses menuju pintu masuk yang curam dengan kelandaian lebih dari 6° dan terdapat banyak motor yang diparkirkan di jalan menuju pintu menjadikan jalan menuju pintu masuk menjadi lebih sempit. Selain itu area bebas bagian belakang area baca juga terbatas dan perabot yang digunakan tidak dapat diatur ketinggiannya. Pada area multimedia dan referensi, area baca dan koleksi saling berdekatan satu sama lain yang akan menghambat sirkulasi pengguna. Adanya hambatan-hambatan tersebut membuat para pemustaka berkebutuhan khusus kehilangan haknya dalam mendapatkan pelayanan yang layak.



Gambar 1.1.1 kondisi area baca, area koleksi dan area parkir
Sumber : (dokumentasi penulis, 2019)



Gambar 1.1.2 kondisi pintu masuk dan area multimedia dan referensi
Sumber : (dokumentasi penulis, 2019)

Rekapitulasi jumlah penyandang disabilitas di Kota Semarang sendiri pada tahun 2017 hingga 2018 sebanyak 1751 orang. Terdiri dari berbagai latar belakang dan umur, para pemustaka tersebut membutuhkan suatu fasilitas dimana mereka dapat memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan dan memperluas pengetahuannya. Pemenuhan hak atas layanan tersebut direalisasikan melalui fasilitas perpustakaan yang ramah kepada pemustaka berkebutuhan khusus. Hal tersebut didukung oleh pernyataan Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo terkait penambahan fasilitas penyandang disabilitas di setiap bangunan Pemerintahan di Jawa Tengah (jatengprov.go.id, 2018).

Selain diperlukannya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas diperlukan juga faktor rekreasi pada perpustakaan masa kini. Mengingat akses untuk suatu informasi yang tidak terus menerus mengacu pada buku fisik, tetapi mulai beralih menuju pada buku digital atau e-book. Fenomena tersebut membuat suatu perpustakaan harus memiliki nilai atau fungsi lebih dimana dapat menarik minat para pengunjung dari berbagai kalangan masyarakat dengan menampilkan fasilitas yang menarik sekaligus dapat mewadahi kebutuhan pengguna berkebutuhan khusus.

Dengan melihat fenomena diatas, perlu diakannya suatu relokasi dan penambahan sarana-prasarana pada perpustakaan umum kota Semarang yang akan meningkatkan pelayanan perpustakaan bagi masyarakat kota semarang secara keseluruhan termasuk sarana-prasarana yang ramah akan pengguna berkebutuhan khusus dan rekreatif.

1.2 Tujuan dan Sasaran

1.2.1 Tujuan

Dalam penyusunan Laporan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (LP3A) ini bertujuan merumuskan program dasar perencanaan dan perancangan arsitektur yang terkait dengan Laporan Perencanaan dan Perancangan Arsitektur Perpustakaan Umum Ramah Pengguna Berkebutuhan Khusus di Kota Semarang agar menjadi suatu tempat yang dapat memenuhi kebutuhan akan informasi dan pengetahuan bagi para penduduk secara keseluruhan termasuk penduduk berkebutuhan khusus yang berada di kota Semarang.

1.2.2 Sasaran

Sasaran dalam pembahasan Laporan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (LP3A) adalah penyusunan program dasar perencanaan yang mencakup proses dasar dan konsep perancangan arsitektur berjudul Perpustakaan Umum Ramah Pengguna Berkebutuhan Khusus di Kota Semarang berdasarkan aspek kontekstual, fungsional, arsitektural, teknis serta kinerja dengan pendekatan desain arsitektur Modern.

1.3 Manfaat

1.3.1 Manfaat Subyektif

Manfaat Subyektif dalam penyusunan Laporan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (LP3A) adalah sebagai salah satu bagian persyaratan Tugas Akhir dalam ketentuan kelulusan Sarjana Strata I pada Departemen Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Diponegoro yang dimana LP3A tersebut akan dijadikan acuan dalam proses perencanaan dan perancangan Perpustakaan Umum Ramah Pengguna Berkebutuhan Khusus di Kota Semarang.

1.3.2 Manfaat Obyektif

Penyusunan Laporan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (LP3A) ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu arsitektur serta menambah wawasan mengenai prinsip-prinsip perencanaan sebuah Perpustakaan Umum Ramah Pengguna Berkebutuhan Khusus di Kota Semarang.

1.4 Ruang Lingkup

1.4.1 Ruang Lingkup Substansial

Pembahasan difokuskan pada hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan dan perancangan Perpustakaan Umum Ramah Pengguna Berkebutuhan Khusus di Kota

Semarang dengan mempertimbangkan aspek fungsional, aspek kontekstual, aspek teknis, aspek arsitektural, dan penekanan desain.

1.4.2 Ruang Lingkup Spasial

Secara administratif berisi daerah perencanaan Perpustakaan Umum Ramah Pengguna Berkebutuhan Khusus di Kota Semarang.

1.5 Metode Pembahasan

Metode Pembahasan yang digunakan dalam sinopsis ini yaitu studi Literatur, Studi Kasus, Survey Lokasi, Proses Pengumpulan data serta analisis data.

A. Studi Literatur

Melakukan studi literatur dengan mengumpulkan kajian mengenai perpustakaan umum, individu berkebutuhan khusus, universal desain, serta pendekatan arsitektur yang digunakan melalui buku, jurnal, internet.

B. Studi Kasus

Melakukan studi kasus terhadap perpustakaan umum kota Semarang yang kemudian data mengenai fenomena yang terjadi di lapangan akan menjadi bahan kajian.

C. Survey lokasi

Melakukan survey pada Perpustakaan Umum Kota Semarang dan obyek studi banding untuk mendapatkan data mengenai kondisi fisik dan non fisik.

D. Proses Pengumpulan Data

Proses mengumpulkan data yang kemudian akan dikaji.

E. Analisis Data

Melakukan proses analisis berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara lapangan serta studi banding yang kemudian hasil analisis tersebut dijadikan acuan dalam perancangan.

1.6 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penyusunan sinopsis yang berjudul Perpustakaan Umum untuk Pengguna Berkebutuhan Khusus di Kota Semarang adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan sasaran pembahasan, manfaat, serta ruang lingkup pembahasan. Terdapat pula metode pembahasan, sistematika pembahasan, dan dilengkapi dengan alur pikir.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisikan studi literatur mengenai perpustakaan umum yang mencakup definisi umum, fungsi, tujuan, pelaku, kegiatan dari para pengguna bangunan, Kajian Individu Berkebutuhan Khusus, Kajian Kemudahan Bangunan Gedung, Perpustakaan ramah disabilitas, Kajian mengenai arsitektur modern dan studi banding terkait proyek sejenis.

BAB III TINJAUAN DATA

Berisikan informasi tentang tinjauan Kota Semarang beserta peraturan dan kebijakan dari Pemerintah setempat, data fisik dan non fisik seperti jumlah penyandang disabilitas Kota Semarang, Data perpustakaan umum kota Semarang serta pemilihan lokasi.

BAB IV PENDEKATAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN

Berisi tentang aspek fungsional (pelaku, jumlah pengelola, jumlah pengunjung, pendekatan aktivitas, pendekatan kebutuhan ruang, pendekatan program ruang), aspek kontekstual, aspek teknis, aspek kinerja, aspek arsitektural.

BAB V KONSEP DAN PROGRAM DASAR PERENCANAAN DAN PERANCANGAN

Berisi tentang program dasar perancangan dan konsep dasar perancangan serta penekanan desain berupa program ruang, struktur bangunan, utilitas bangunan dan karakter bangunan.

1.7 Alur Pikir

